



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 25 /900/2023

TENTANG

NOMOR REKENING VIRTUAL PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penatausahaan penerimaan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, perlu menetapkan Nomor Rekening Virtual Pendapatan Daerah Kota Pariaman pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Nomor Rekening Virtual Pendapatan Daerah Kota Pariaman pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
 11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Tentang Nomor Rekening Virtual Pendapatan Daerah Kota Pariaman pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

KEDUA : Nomor Rekening Virtual Pendapatan Daerah Kota Pariaman pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Nomor Rekening Virtual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan dalam penyetoran pendapatan daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

KEEMPAT : Nomor Rekening Virtual sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini terdiri dari:

a. Kode Rekening *Virtual Account* Dinamis :

1. 6 Digit Pertama : Kode Bank
2. 3 Digit Kedua : Kode Pajak/Retribusi
3. 2 Digit Ketiga : Kode Tahun YY
4. 2 Digit Keempat : Kode Bulan MM
5. 6 Digit Kelima : Nomor Urut

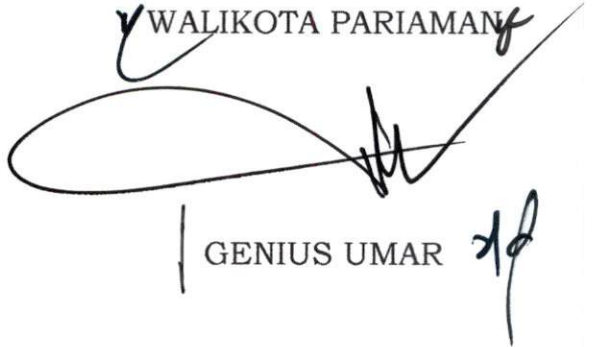
b. Kode Rekening *Virtual Account* Statis :

1. 6 Digit Pertama : Kode Bank
2. 3 Digit Kedua : Kode Pajak/Retribusi
3. 2 Digit Ketiga : Kode OPD
4. 3 Digit Keempat : Kode No Urut

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Februari 2023

WALIKOTA PARIAMAN


GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
PRORUM HUKUM KOTA PARIAMAN	
UN / S. HAWA LEMPA	PARAF / TGL
7/2.23	
ASISTEN K. HUKUM & HAK ASASI MANUSIA	8/2.23
PLAIPRIKATON	12.23
PADAN H. KUMAR	10/2.23
KASUBAG. PERUNDANG-UNDANGAN	

Lampiran I : Keputusan Walikota Pariaman
 Nomor : 25 /900/2023
 Tanggal : 6 Februari 2023
 Tentang : NOMOR REKENING VIRTUAL PENDAPATAN DAERAH
 KOTA PARIAMAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN
 DAERAH SUMATERA BARAT

KODE REKENING VIRTUAL ACCOUNT DINAMIS PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
 SUMATERA BARAT

Rekening Virtual Account					JENIS PENERIMAAN	NOMOR REKENING PENAMPUNGAN QRIS	OPD		
KODE BANK	KODE PAJAK	TAHUN	BULAN	NO URUT					
					PENDAPATAN ASLI DAERAH				
					PAJAK DAERAH				
993322	001	YY	MM	XXXX XX	PAJAK HOTEL	05000101012502			BPKPD
993322	002	YY	MM	XXXX XX	PAJAK RESTORAN	05000101012513			BPKPD
993322	003	YY	MM	XXXX XX	PAJAK HIBURAN	05000101012524			BPKPD
993322	004	YY	MM	XXXX XX	PAJAK REKLAME	05000101012546			BPKPD
993322	005	YY	MM	XXXX XX	PAJAK PARKIR	05000101012550			BPKPD
993322	006	YY	MM	XXXX XX	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	05000101012572			BPKPD

993322	007	YY	MM	XXXX XX	PAJAK AIR TANAH		
					RETRIBUSI DAERAH		
					RETRIBUSI JASA UMUM		
993322	008	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN		DINKES
993322	009	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN		DISPERKIMLH
993322	010	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM		DISHUB - UPTD PERPARKIRAN
993322	011	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR		DISPERINDAGKOPUMKM
993322	012	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		DISHUB
993322	013	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN		DISSATPOL PP DAN DAMKAR
993322	014	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS		DISPERKIMLH
993322	015	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI PENGELOLAAN		DISPERKIMLH

					LIMBAH CAIR		
993322	016	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG		DISPERINDAGKOPUMKM- UPTDMETROLOGI
993322	017	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN		BKPSDM, DISDIKPORA
993322	018	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA DAN TELEKOMUNIKASI		DISKOMINFO
					RETRIBUSI JASA USAHA		
993322	019	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH		
993322	020	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN		DISPERINDAGKOP UMKM
993322	021	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT		
993322	022	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN		DPPP
993322	023	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI TERMINAL		DISHUB
993322	024	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR		DISHUB
993322	025	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANG GRAHAN/ VILA		DISPARBUD

993322	026	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN		DPPP
993322	027	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN		DISHUB
993322	028	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA		DISPARBUD DAN DISDIKPORA
993322	029	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI PENYEBERANGAN AIR		DISHUB
993322	030	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH		DPPP
					RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU		
993322	031	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN		DPU
993322	032	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI IZIN TRAYEK UNTUK MENYEDIAKAN PELAYANAN ANGKATAN UMUM		DISHUB
993322	033	YY	MM	XXXX XX	RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS		DISHUB

					HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
					LABA LAIN-LAIN PAD YANG SAH		
					HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DI PISAHKAN		
993322	034	YY	MM	XXXX XX	HASIL PENJUALAN TANAH		BPKPD
993322	035	YY	MM	XXXX XX	HASIL PENJUALAN PERALATAN DAN MESIN		BPKPD
993322	036	YY	MM	XXXX XX	HASIL PENJUALAN GEDUNG DAN BANGUNAN		BPKPD
993322	037	YY	MM	XXXX XX	HASIL PENJUALAN ASET TETAP LAINNYA		BPKPD
993322	038	YY	MM	XXXX XX	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN		BPKPD
993322	039	YY	MM	XXXX XX	TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA		BPKPD
993322	040	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL		BPKPD
993322	041	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN		BPKPD
993322	042	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA PAJAK HIBURAN		BPKPD

993322	043	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA PAJAK REKLAME		BPKPD
993322	044	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA PAJAK PARKIR		BPKPD
993322	045	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		BPKPD
					PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI DAERAH		
					PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI JASA UMUM		
993322	046	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN		DINKES
993322	047	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBE RSIHAN		DISPERKIMLH
993322	048	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM		DISHUB
993322	049	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PELAYANAN PASAR		DISKOPERINDAGUMKM
993322	050	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI		DISHUB

					PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		
993322	051	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN		DISSATPOLPP DAN DAMKAR
993322	052	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR		DISPERKIMLH
993322	053	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG		DISPERINDAGKOPUMKM
993322	054	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN		BKPSDM DAN DISDIKPORA
993322	055	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI		DISKOMINFO
					PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI JASA USAHA		
993322	056	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH		BPKPD

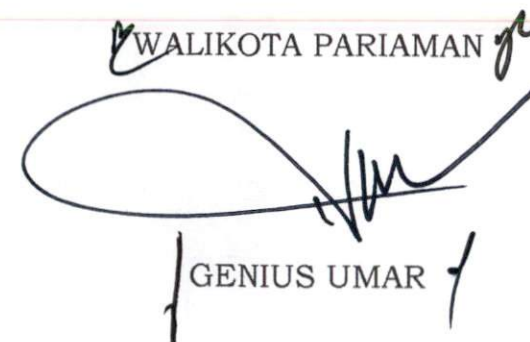
993322	057	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN		DISKOPERINDAGUMKM , BPKPD, DISPARBUD
993322	058	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN		DPPP
993322	059	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI TERMINAL		DISHUB
993322	060	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR		DISHUB
993322	061	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANG GRAHAN/VILA		DISPARBUD
993322	062	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN		DPPP
993322	063	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN		DISHUB
993322	064	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA		DISPARBUD
993322	065	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN AIR		DISHUB

					PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PERIZINAN TERTEUTU			
993322	066	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN			DPU
993322	067	YY	MM	XXXX XX	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS			DISHUB

KETERANGAN :

1. 6 (enam) digit pertama kode Bank
2. 3 (tiga) digit Kedua Kode Pajak /Retribusi
3. 2 (dua) digit Ketiga kode tahun YY
4. 2 (dua) digit Keempat kode bulan MM
5. 6 (enam) digit kelima kode nomor urut

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

Lampiran II : Keputusan Walikota Pariaman
 Nomor : 25 /900/2023
 Tanggal : 6 Februari 2023
 Tentang : NOMOR REKENING VIRTUAL PENDAPATAN DAERAH
 KOTA PARIAMAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN
 DAERAH SUMATERA BARAT

KODE REKENING VIRTUAL ACCOUNT STATIS PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
 SUMATERA BARAT

Rek Virtual Account				JENIS PENERIMAAN	NOMOR REKENING PENAMPUNGAN QRIS	OPD
Kode Bank	Kode Pajak / Retribusi	OPD	NO Urut			
				PENDAPATAN ASLI DAERAH		
				PAJAK DAERAH		
993333	001	02	001	PAJAK PENERANGAN JALAN		BPKPD
993333	002	02	002	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)	05000101012594	BPKPD
993333	003	02	003	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	05000101012605	BPKPD
				RETRIBUSI DAERAH		

				RETRIBUSI JASA UMUM		
				RETRIBUSI JASA USAHA		
				RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH		
				HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
993333	004	02	004	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BUMD		BPKPD
993333	005	02	005	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BUMD (BIDANG AIR MINUM)		BPKPD
				LABA LAIN-LAIN PAD YANG SAH		
				HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DI PISAHKAN		BPKPD
993333	006	02	006	JASA GIRO		BPKPD
993333	007	02	007	HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULIR		BPKPD
993333	008	02	008	PENDAPATAN BUNGA ATAS PENEMPATAN UTANG PEMERINTAH DAERAH		BPKPD
993333	009	02	009	PENERIMAAN KOMISI,POTONGAN ATAU BENTUK LAIN		BPKPD
993333	010	02	010	PENDAPATAN DENDA PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)		BPKPD
993333	011	02	011	PENDAPATAN DENDA PAJAK BUMI DAN		BPKPD

				BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)		
993333	012	02	012	PENDAPATAN DENDA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)		BPKPD
993333	013	02	013	HASIL EKSEKUSI ATAS JAMINAN ATAS PENGADAAN BARANG/JASA		BPKPD
993333	014	02	014	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHA SILAN PASAL 21		BPKPD
993333	015	02	015	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN		BPKPD
993333	016	02	016	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN		BPKPD
993333	017	02	017	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS		BPKPD
993333	018	02	018	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)		BPKPD
993333	019	02	019	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN JAMINAN KEMATIAN (JKM)		BPKPD
993333	020	02	020	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)		BPKPD
993333	021	03	021	PENDAPATAN BLUD		DINKES
993333	022	02	022	PENDAPATAN DENDA PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK TERPISAHKAN		BPKPD
993333	023	02	023	PENDAPATAN DENDA HASIL DARI KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR		BPKPD
993333	024	02	024	PENDAPATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS		

				TINGKAT PERTAMA (FKTP)		
993333	025	02	025	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULIR		BPKPD
993333	026	13	026	PENDAPATAN DENDA ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH		DINAS SAT POL PP DAN DAMKAR
993333	027	02	027	PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN		BPKPD
993333	028	02	028	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN IURAN SIMPANAN PESERTA TAPERA ASN		BPKPD

KETERANGAN :

1. 6 Digit pertama kode Bank
2. 3 Digit Kedua Kode Pajak/Retribusi
3. 2 Digit Ketiga kode OPD
4. 3 Digit Keempat kode No Urut

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	Paraf / TGL
SERDAGO PARIAMAN	5/2.23
ASISTEN ADMINISTRASI PLH / RISTAHAN	03/23
KASUBK. IP / R. 10	12/20
KASUBK. PL / R. 10	12/23
UNDANGAN	

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR